



Lemhannas RI

Tanhanna Dharmma Mangrva

Edisi 74, September 2015



Lemhannas RI Tanda Tangan MoU dengan Bank Mandiri **hal 3**



PPSA XX Gelar *Workshop*, Hadirkan Profesor dari King's College London dan Jimly Asshiddiqie **hal. 4**



Gelar Pertemuan Bakohumas Se-Indonesia, Lemhannas RI Serukan Revitalisasi Humas **hal. 6**



Mikhail Y. Galuzin : "Tidak Ada Negara yang Dapat Mengamankan Negaranya dengan Merugikan Negara Lain" **hal. 9**



SBY : "Siapa Yang Berani, Akan Menang!"

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Ke - 6 Republik Indonesia memberikan kuliah umum kepada Para peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 20, Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 53, Program Pemantapan Pejabat Daerah Angkatan (P3DA) 9 dan seluruh pejabat struktural Lemhannas RI dalam acara *Presidential Lecture* yang dibuka Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. di Auditorium Gadjah Mada pada Selasa (8/9)...(*selengkapnya hal. 8*)

Foto: Humas Lemhannas RI

Daftar Isi:

Gotong Royong dan Kearifan Lokal Yang Menguatkan Keutuhan Indonesia...hal 2

Lemhannas RI Tanda Tangan MoU dengan Bank Mandiri...hal 3

Ketua BMKG: Terkait Perubahan Iklim, Indonesia Perlu Bekerja Sama dengan Negara Lain...hal 3

PPSA XX Gelar Workshop, Hadirkan Profesor dari King's College London dan Jimly Asshiddiqie...hal 4

Transformasi Parpol Diperlukan dalam Reformasi Sistem Politik...hal 5

Gelar Pertemuan Bakohumas Se-Indonesia, Lemhannas RI Serukan Revitalisasi Humas ...hal 6

Jusuf Kalla Berikan Kuliah Umum Budaya Bahari kepada Peserta Pendidikan Lemhannas RI...hal 7

SBY : "Siapa Yang Berani, Akan Menang!" ...hal 8

Mikhail Y. Galuzin : "Tidak Ada Negara yang Dapat Mengamankan Negeranya dengan Merugikan Negara Lain" ...hal 9

Lemhannas RI Tanda Tangan Tiga Nota Kesepahaman Lemhannas...hal 10

Buka Workshop Labkurtannas, Gubernur Lemhannas RI...hal 11

Pelepasan Lulusan Mahasiswa Program Studi Kajian Ketahanan Nasional L-IUN Lemhannas RI - UI ...hal 12

Tim Redaksi:

Pengarah:

Suhardi Alius

Penanggung Jawab:

E. Estu Prabowo

Redaktur Pelaksana:

Wahyu Widji Pamungkas

Penyunting/Editor:

Bambang Iman Aryanto

Staf Redaksi:

Trias Noverdi, Aditya Solehah, Ni Made Vira Saraswati, C. Hildamona Permatasari, Magista Dian Fitrilia

Desain:

Bambang Iman Aryanto

Fotografer:

Suryadi, Suyono, Dwi Jayanto

Sekretariat:

Linda Purnamasari, Gatot, Indiah Winarni

Distribusi:

Sumurung, Supriyono

Alamat Redaksi:

Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110,

Telp. (021) 3832108, 3832109, Fax. (021) 3451926,

Website <http://www.lemhannas.go.id>

Gotong Royong dan Kearifan Lokal Yang Menguatkan Keutuhan Indonesia



Foto : Humas Lemhannas RI

Jenderal Gatot Nurmantyo kembali memberikan ceramah kepada peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan XX (PPSA XX) sebagai Panglima TNI di Ruang Bhinneka Tunggal Ika, Lt. III Gd. Panca Gatra Lemhannas RI, Selasa (25/8) setelah sebulan sebelumnya beliau diundang menjadi narasumber ketika menjadi Kepala Staf Angkatan AD (KASAD). Kali ini, Panglima TNI memaparkan tentang **"Kebijakan Strategis TNI dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional dan Kawasan"**.

Stabilitas nasional Indonesia dan kawasan sekarang ini menurut Panglima TNI diwarnai oleh permasalahan ekonomi dunia, masalah Laut Tiongkok Selatan, Arab *Spring*, permasalahan di Melanesia, dan konflik perbatasan. Oleh sebab itu, Indonesia harus memiliki modal kuat untuk menjaga keutuhan NKRI.

Dalam ceramahnya Gatot Nurmantyo menyatakan bahwa Indonesia memiliki modal secara geografi dan demografi. Secara geografis, Indonesia memiliki potensi kekayaan darat dan laut untuk menjadi negara agraris sekaligus negara maritim berlimpah. Sementara itu, secara demografis, Pancasila dan kearifan lokal adalah modal yang meneguhkannya.

Gatot menilai jika visi Presiden Republik Indonesia yakni terwujudnya Indonesia yang berkeadilan, berlandaskan gotong-royong dapat tercapai Indonesia akan menjadi bangsa yang sangat luar biasa.

Gotong-royong merupakan kearifan lokal yang harus dilestarikan karena dengan gotong-royong persatuan akan terjaga. Gatot Nurmantyo mengungkapkan, "Dan itu sudah dibuktikan oleh dua kerajaan besar (Sriwijaya dan Majapahit, red) bisa tidak hancur oleh serangan dari luar, tetapi hancur dari dalam sendiri".

Ceramah ini kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi dengan peserta PPSA XX. Turut hadir pula dalam mendengarkan ceramah ini Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A., Deputi Pendidikan Lemhannas RI Mayjen TNI Nasir Madjid, Taji Bidang Ketahanan Nasional Marsda TNI Bonar H. Hutagaol, S.E. dan Direktur Operasi Pendidikan Lemhannas RI Brigjen TNI Juwondo.



Lemhannas RI Tanda Tangan MoU dengan Bank Mandiri

“**U**ntuk menjadi *the best bankers* di Asia, *don't underestimate patriotism atau nationalism*”, ungkap Direktur Utama PT Mandiri (Persero)

Tbk Bapak Budi Gunadi Sadikin ketika memberikan sambutan dalam penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MoU) dengan Lemhannas RI di Lobi Nusantara, Lt. I Gd. Tri Gatra, Selasa (25/8). Budi Gunadi Sadikin menyatakan Bank Mandiri ingin menjadi bank terbaik di Asia. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu yang dilakukan adalah dengan mencetak bankir-bankir berkualitas yang juga mempunyai jiwa nasionalis.

Sementara itu, Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. sangat apresiatif atas kesepakatan ini. “Hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah buat Lemhannas karena menandatangani MoU dengan salah satu bank yang mempunyai aset terbesar”, ujar Budi Susilo Soepandji. Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas SDM dan tukar-menukar informasi.



Pada kesempatan ini, hadir pula jajaran Direksi Mandiri, Wakil Gubernur Lemhannas RI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A., Sekretaris Dewan Pengarah Lemhannas RI Dr. Ardi Partadinata, M.H., M.Si., Sekretaris Utama Lemhannas RI Drs. Suhardi Alius., M.H., para Deputi, dan para Kepala Biro Lemhannas RI.

Ketua BMKG: Terkait Perubahan Iklim, Indonesia Perlu Bekerja Sama dengan Negara Lain

“**C**limate change could confront us with a whole range of unpleasant development—developments which no single nation state has the power to certain,” ujar Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dr. Andi Eka Sakya, M.Eng. mengutip pernyataan Sekretaris Jenderal NATO Jaap de Houp Scheffer saat memberikan pembekalan kepada para Peserta PPRA LIII di Ruang NKRI, Gd. Pancagatra Lt. 4 Lemhannas RI pada Rabu (26/8).

Dalam kesempatan tersebut, Andi Eka Sakya menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, perubahan iklim yang signifikan telah terjadi di seluruh dunia. Hal ini ditandai dengan adanya gejala peningkatan suhu di berbagai wilayah, frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem yang meningkat, serta meningkatnya area lelehan salju di Puncak Jaya Wijaya yang merupakan satu dari tiga salju abadi di dunia.

Perubahan iklim menjadi hal penting yang harus dipahami, sebagaimana Renstra NATO tahun 2008 yang menyatakan bahwa ada empat ancaman strategis yang harus diwaspadai, yakni perubahan iklim, negara gagal (*state failure*), terorisme,



dan globalisasi (komoditas, permodalan, dan orang).

Di samping itu, perubahan iklim juga memberikan dampak vertikal dan horisontal, sebagai contoh datangnya *El Nino* yang akan membawa dampak kekeringan di beberapa wilayah. Untuk menghadapi perubahan iklim yang terjadi, Andi Eka Sakya mengatakan bahwa perlu adanya kerja sama dengan negara lain. “Tidak ada satu pun negara yang bisa menghadapinya, kecuali adanya kerja sama dengan negara lain,” pungkasnya

PPSA XX Gelar *Workshop*, Hadirkan Profesor dari King's College London dan Jimly Asshiddiqie

Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan XX (PPSA XX) Lemhannas RI menggelar *Workshop* Pra Seminar “Mewujudkan Poros Maritim Dunia” pagi ini di Ruang Syailendra, Lt. III Gd. Asta Gatra Lemhannas RI pada Kamis (27/08) dengan menghadirkan pakar maritim internasional dari King's College London, Prof. Geoffrey Till, Mantan Ketua MK Prof. Jimly Asshiddiqie, dan Dirut PT Pelindo II R J Lino.

“Maritim (*being maritime*) dan negara maritim (*maritime power*) adalah dua hal yang berbeda”, demikian ungkap Till. Maritim merujuk pada keadaan geografis, kultur, dan ekonomi, sementara negara maritim lebih kompleks. Ketika sebuah negara ingin menjadi kekuatan maritim, negara tersebut harus terlebih dahulu memiliki tujuan (*objective*) yang jelas.

Acara workshop pra seminar yang dihadiri pula oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji dan Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A ini, Geoffrey Till menyatakan bahwa salah satu faktor penting dalam mewujudkan kekuatan poros maritim adalah sosok pimpinan negara yang bervisi kuat.

“Agenda *setting* dalam mewujudkan negara maritim memerlukan koordinasi yang tinggi sehingga dibutuhkan *strong leader* yang mempunyai inovasi tinggi dan berprofil politik berkelas”, ujar Till. Selain itu, Till menambahkan bahwa kebijakan negara maritim

harus pula dibangun secara jangka panjang.

Hal senada juga diungkapkan oleh Prof Jimly, “Misalnya kita serahkan ini pada dinamika politik, maka ini hanya terjebak nanti di dalam agenda 5 tahun. Ganti presiden pasti ganti lagi temanya. Tetapi kalo kita susun menjadi suatu kebijakan jangka panjang, insya Allah dia berdasarkan UUD 1945 mengenal wilayah negara yang itu saya namakan basis konstitusional dari *blue constitutional* Indonesia, *blue policy of* Indonesia, Insya Allah kita punya kebijakan yang *sustainable*”.

Sementara itu, R J Lino menyatakan bahwa konsep tol laut merupakan ide untuk membuat masyarakat mengerti tentang pentingnya laut. “Pak Jokowi menggunakan bahasa yang lebih ulet, tol laut. Konsep ini sebenarnya menyatukan Indonesia secara ekonomis”, ungkap Lino.



Foto : Humas Lemhannas RI



Foto : Humas Lemhannas RI



Transformasi Partai Politik Diperlukan dalam Reformasi Sistem Politik



Sistem pengkaderan yang kurang berjalan dengan baik dalam partai politik dapat dikatakan belum menggunakan asas *the right man on the right place*. Demikian dikatakan oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. saat membuka acara *Round Table Discussion* bertema **“Reformasi Sistem Politik Guna Mendukung Stabilitas Nasional dalam Rangka Ketahanan Nasional”** di Ruang Kresna, Gd. Panca Gatra Lt. 4 Lemhannas RI, Selasa (1/9).

Budi Susilo Soepandji dalam sambutannya mengatakan bahwa demokrasi melahirkan keterbukaan politik yang diharapkan sesuai prinsip reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel. Partai politik sebagai bagian dari demokrasi tidak terlepas dari berbagai persoalan. Terkait hal ini, Budi Susilo Soepandji menekankan empat poin penting berkenaan dengan Parpol yakni proses rekrutmen, proses pengkaderan, penempatan kader Parpol di tempat yang tepat, dan etika politik.

Acara ini menghadirkan dua narasumber, yakni Deputi Koordinator Bidang Politik Dalam Negeri Kemenkopolkhumak Mayjen TNI Yoedhi Swastono serta Pengamat Politik dan Peneliti Senior *Center for Strategic and International Studies* (CSIS) J. Kristiadi. Adapun penanggap yang hadir yakni Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI. Dr. Didit Herdiawan, M.PA., M.B.A., Tenaga Profesional Pemdagri Lemhannas RI Dr. Kausar, A.S., M.Si., Dosen FISIP UI Hurriyah, S.Sos., M.A.S. , dan Dosen FISIP UIN Zaki Mubarak, S.IP., M.A.

Yudhi Swastono mengatakan bahwa sistem politik di Indonesia tidak boleh terlepas dari empat konsensus dasar bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Dalam sebuah penelitian tentang indeks demokrasi yang dilakukan oleh Kemenkopolkhumak bekerja sama dengan LIPI dan Bapennas tahun 2014, diketahui bahwa persentase indeks demokrasi Indonesia sebanyak 73,04% sehingga berada di tahap sedang. Sementara itu, Yudhi Swastono juga mengatakan bahwa permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian yakni pergeseran fungsi Parpol, pendanaan Parpol, dan kaderisasi Parpol.

Di samping itu, J. Kristiadi mengatakan bahwa Parpol merupakan *epicentrum* dari setiap persoalan politik. Parpol juga menjadi sumber produksi kekuasaan yang memuat cengkeraman oligarki partai dan kewajiban moral. Menurutnya, untuk mengubah kondisi parpol saat ini, kesadaran dan akhlak yang baik saja tidak cukup, perlu kolaborasi dengan pihak lainnya.

Acara yang dimoderatori oleh Tenaga Profesional bidang Pimnas dan Sismennas Mayjen TNI (Purn). S.H.M. Lerrick ini dihadiri oleh Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof Dr. Ir. Djagal Wiseso Marsono, M.Agr., Tenaga Pengkaji, Tenaga Pengajar, Tenaga Profesional, dan Pejabat Struktural Lemhannas RI.



Gelar Pertemuan Bakohumas Se-Indonesia, Lemhannas RI Serukan Revitalisasi Humas

“Saya ingin mengajak seluruh jajaran kehumasan pemerintah untuk merevitalisasi diri melalui perubahan paradigma dan mindset kehumasan pemerintah yang profesional, berintegritas dan berwawasan kebangsaan yang kuat,” ujar Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A. mewakili Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. saat membuka acara Pertemuan Tematik Bakohumas di Gd. Dwi Warna Purwa, Lemhannas RI pada Rabu (2/9).

Dalam upacara pembukaan kegiatan yang menjadi salah satu rangkaian peringatan HUT Emas Ke-50 Lemhannas RI ini, hadir Wakil Sekretaris Kabinet Bistok Simbolon, Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H., Ketua Umum Bakohumas Plt. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo RI Ir. Djoko Agung Harijadi, M.M., para Deputi, Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji, Tenaga Profesional, dan pejabat struktural Lemhannas RI.

Didit Herdiawan mengatakan bahwa sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang mengemban amanah Bung Karno untuk menyiapkan kader pimpinan tingkat nasional dan melaksanakan kajian tentang permasalahan strategis bangsa, Pertemuan Tematik Bakohumas ini merupakan kesempatan berharga untuk berbagi pandangan terkait peran strategis humas pemerintah dalam perspektif ketahanan nasional.

Humas merupakan ujung tombak dan garda terdepan dalam mengkomunikasikan berbagai kebijakan dan mempengaruhi publik untuk mendukung program-program pemerintah. “Hal ini penting untuk dipahami mengingat kesimpangsiuran informasi yang senantiasa berkembang di tengah masyarakat dapat menimbulkan kegaduhan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang berujung pada melemahnya ketahanan nasional bangsa,”

pungkas Didit Herdiawan.

Pertemuan Bakohumas yang terselenggara atas kerja sama antara Lemhannas RI dengan Bakohumas Pusat ini mengundang 416 perwakilan dari kementerian/badan/lembaga pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, DPRD, TNI AD, TNI AL, TNI AU, Polri, perguruan tinggi negeri, BUMN/BUMD, dan diskominfo provinsi (Bakohumasda) di seluruh Indonesia mulai tanggal 2-4 September 2015 dengan mengusung tema **“Efektivitas Peran Humas dalam Implementasi Inpres No. 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik Guna Mewujudkan Ketahanan Nasional”**.

Pertemuan Tematik Bakohumas yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI bekerja sama dengan Bakohumas Pusat selama tiga hari, ditutup usai sesi Dialog Kebangsaan RRI bertema “Skenario Indonesia 2045 dalam Perspektif Ketahanan Nasional” di Ruang Auditorium Gajah Mada Gd. Panca Gatra Lt. 3 Lemhannas RI pada Jumat (4/9).

Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI M. Nasir Majid yang mewakili Gubernur Lemhannas RI mengatakan bahwa humas pemerintah memainkan peranan penting sebagai instrumen strategis penentu kebijakan pemerintah. “Humas pemerintah merupakan ujung tombak pembangunan pemerintah,” ujar Nasir Majid.

Acara Pertemuan Tematik Bakohumas yang diisi oleh kegiatan berupa ceramah, tanya jawab, dan simulasi ini diikuti dengan penuh antusias oleh para peserta yang berjumlah 332 orang yang berasal dari 239 instansi pusat maupun daerah.

Turut hadir dalam acara penutupan pertemuan tersebut yakni Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji, Tenaga Profesional, dan para pejabat struktural Lemhannas RI.



Jusuf Kalla Berikan Kuliah Umum Budaya Bahari kepada Peserta Pendidikan Lemhannas RI



Foto : Humas Lemhannas RI

“Oleh Lemhannas, saya diminta untuk berbicara tentang budaya bahari,” ujar Wakil Presiden RI Jusuf Kalla saat mengawali kuliah umum kepada para peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIII dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XX di Gd. 2 Istana Wakil Presiden, Jakarta pada Senin (7/9).

Jusuf Kalla mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara maritim dan bahari yang terluas di dunia. Selain Filipina dan Jepang, Indonesia menjadi salah satu dari tiga negara di dunia yang memiliki rangkaian pulau yang tergabung sebagai satu negara kesatuan. Selain itu, kondisi geografis Indonesia yang 60% wilayahnya terdiri dari lautan membuat potensi laut di Indonesia sangat besar.

Strategi dan penanganan khusus diperlukan Indonesia sebagai negara maritim dan bahari, misalnya ranah transportasi laut yang harus ditingkatkan sarana dan prasarannya untuk mengurangi biaya logistik dan mengatasi permasalahan diversitas antarpulau. “Kita memaknai bahwa laut menyatukan kita, bukan memisahkan,” pungkask Jusuf Kalla.

Kebanggaan maritim dan bahari di masa lalu pada Era

Kerajaan Majapahit dan pencapaian pelaut Bugis yang berhasil mencapai Madagaskar menggunakan kapal pinisi, menurut Kalla, hendaknya menjadi harapan dan optimisme di masa mendatang.

Sementara itu, Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. mengatakan bahwa Lemhannas RI tengah menyelenggarakan program pendidikan bagi calon pimpinan nasional di masa depan yakni PPRA LIII dan PPSA XX. PPRA LIII yang akan ditutup tanggal 29 Oktober 2015 ini diikuti oleh 117 peserta, 11 peserta di antaranya berasal dari negara sahabat seperti Australia, Singapura, Malaysia, Thailand, Myanmar, Kamboja, Timor Lesta, Aljazair, Sri Lanka, Zimbabwe, dan Papua New Guinea. Sementara PPSA XX diikuti oleh 80 orang peserta dan akan ditutup tanggal 5 November 2015 mendatang.

Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A., Sekretaris Dewan Pengarah Dr. Ir. Ardhi Partadinata, M.H., M.Si., Sekretaris Utama Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H., Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji, dan Tenaga Profesional turut hadir dalam acara kuliah umum tersebut.



Foto : Humas Lemhannas RI

SBY : “Siapa Yang Berani, Akan Menang!”

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A secara resmi membuka acara *Presidential Lecture* oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang merupakan salah satu rangkaian acara dalam rangka HUT Emas Lemhannas RI Ke-50 di Ruang Auditorium Gajah Mada Lt. 3 Gd. Pancagatra Lemhannas RI pada Selasa (8/9).

Dalam sambutannya, Budi Susilo Soepandji mengatakan dengan masa pengabdian yang sudah mencapai setengah abad, Lemhannas RI telah mengalami dinamika dan pasang surut yang membentuk Lemhannas RI sebagai perekat strategis komponen bangsa. Selain itu, Lemhannas juga sedang dan terus melakukan pematangan kelembagaan secara menyeluruh. “Kesempatan *Presidential Lecture* kali ini sungguh merupakan momentum untuk mendapatkan pencerahan bagi jajaran Lemhannas dalam menata diri dan menetapkan langkah langkah untuk menjadi Lembaga yang profesional dan dapat dibanggakan.” ujar Budi Susilo Soepandji.

Sementara itu, SBY mengatakan dalam kuliah umum yang berjudul “Indonesia Abad 21: Peluang dan Tantangan menjadi Negara Maju, Kuat dan Sejahtera” bahwa yang akan menjadi pemenang di era globalisasi ini adalah mereka yang mampu menolak ancaman dan secara cerdas mampu menciptakan peluang agar bangsa ini mampu maju, kuat dan sejahtera.

Lebih lanjut, SBY menyampaikan bahwa negara maju adalah negara yang memiliki tingkat peradaban yang tinggi,

kehidupan yang maju, dan menguasai ilmu pengetahuan. Sedangkan negara yang kuat berarti kuat secara demokrasi, kuat secara ekonomi dan kuat secara pertahanan. Sejahtera berarti bahwa rakyat Indonesia tidak hanya makmur secara ekonomi namun juga hidup damai dan tentram.

Selain itu, SBY menyampaikan bahwa untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa tersebut harus bercita-cita besar dan berkarya besar. “Siapa yang berani untuk mengubah keadaan, mengubah Indonesia ini, berfikir *thinking outside the box*, yang tidak biasanya, *who dares, win*. Siapa yang berani, akan menang.” ujar SBY.

Indonesia, jelas SBY, memiliki peluang untuk menjadi negara maju karena Indonesia merupakan bangsa yang masih muda. Indonesia juga merupakan negara yang selalu bisa keluar dari krisis yang melanda. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi dan sumber daya yang besar. Hal yang paling penting adalah Indonesia tidak statis dan masih terus bertransformasi dalam hal sistem pemerintahan, ekonomi, cara berfikir, dan hukum. “Transformasi itu akan, bahkan harus terus berlanjut hingga 30 atau 40 tahun ke depan.” pungkas SBY.

Turut hadir dalam acara ini yakni Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A, M.B.A, Sekretaris Utama Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H, para Deputi, peserta PPRA LIII, peserta PPSA XX, anggota IKAL, perwakilan lembaga/kementerian, Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji, Tenaga Profesional, serta para pejabat Struktural Lemhannas RI.



Mikhail Y. Galuzin : “Tidak Ada Negara yang Dapat Mengamankan Negaranya dengan Merugikan Negara Lain”

Ramainya tantangan yang berpotensi menggoyahkan ketahanan regional ASEAN, seperti potensi konflik Laut Cina Selatan, isu terorisme, dan konflik perbatasan, mendapat atensi dari Lemhannas RI yang menyelenggarakan Seminar Internasional yang mengangkat tema **“Strengthening ASEAN Regional Resilience Challenges and Opportunities”**, Jakarta (09/09).

Seminar Internasional yang berawal dari keinginan dan harapan dalam mewujudkan ketahanan regional ASEAN ini diselenggarakan untuk dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang dari ketahanan regional ASEAN. Beberapa Duta Besar mewakili negaranya menyampaikan perspektif masing-masing mengenai ketahanan regional ASEAN.

Salah satu Duta Besar yang hadir adalah Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Y.M. Mikhail Y. Galuzin yang menyatakan bahwa tidak ada keraguan bagi Rusia untuk menganggap ASEAN sebagai salah satu partner penting negaranya. Y.M. Mikhail Y. Galuzin juga mengungkapkan bahwa Rusia dan ASEAN telah mempersiapkan pencegahan radikalisme bersama-sama. Beliau juga menekankan bahwa untuk mempertahankan negara tidak perlu merugikan negara lain. Pertahanan dan Ketahanan masih dapat diciptakan dengan tidak menggunakan kekerasan.

ASEAN diperkirakan telah mengadakan 1200 pertemuan pada berbagai level hingga tahun 2014. Menurut Perwakilan Tetap Indonesia untuk ASEAN, Rahmat Pramono, ASEAN telah memiliki infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjaga ketahanan regional. Rahmat Pramono berpendapat bahwa ASEAN memiliki makna lebih dalam dari sekedar berdiri sebagai Asosiasi, ASEAN adalah sebuah proses, dan saat ini ASEAN perlu menggunakan infrastruktur yang telah ada dengan lebih efektif.

Sebagai negara mitra ASEAN, Yukiko Okano, Deputy Chief of Mission, Mission of Japan to ASEAN, mewakili Duta Besar Jepang untuk Indonesia berbagi *lesson-learned* bahwa ketahanan nasional di Jepang justru banyak diperdebatkan setelah terjadinya musibah gempa besar pada 11 Maret 2011. Jepang meninjau dan mempertimbangkan kembali ketahanan nasional seperti apa yang sesungguhnya perlu diciptakan.

Lebih lanjut Yukiko Okano menyampaikan bahwa Negara-Negara ASEAN diharapkan dapat mempelajari pengalaman Jepang dalam menjaga ketahanan nasional dan harus menghadapi serta mengkonsolidasikan setiap isu penting secara bersama-sama karena setiap negara tidak dapat menghadapi isu ketahanan regional sendiri.



Foto : Humas Lemhannas RI

Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Y.M. Anil Kumar Nayar, memiliki suara yang sama dengan Yukiko Okano, bahwa negara-negara ASEAN harus bersatu untuk menciptakan ketahanan regional. Y.M. Anil Kumar Nayar menyampaikan bahwa ASEAN mungkin saat ini tidak sempurna *"but it is a work in progress"*, ujarnya.

ASEAN dapat belajar dari Uni Eropa yang dapat maju dan berkembang di tengah krisis ekonomi yang menimpanya. Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar Belgia untuk Indonesia, Y.M. Patrick Hermann, yang menekankan bahwa krisis seharusnya tidak membuat kita lemah namun krisis adalah sebuah peluang untuk membuat kita lebih kuat. Sejak 2010, Belgia telah berkontribusi dalam pembangunan kapasitas ASEAN salah satunya melalui pelatihan manajemen resiko bencana. Dalam Seminar yang dimoderatori oleh Mayjen (Purn) Albert Inkiriwang tersebut, Y.M. Patrick Hermann juga menyoroti pentingnya bagi ASEAN untuk memetakan tantangan konvensional maritim.

Turut hadir memberikan perspektif mengenai ketahanan regional ASEAN yaitu Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L.M., Ph.D, dan Duta Besar Turki untuk Indonesia, Y.M. Zekeriya Akcam. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L.M., Ph.D menyampaikan perspektif kesiapan menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN, sedangkan Y.M. Zekeriya Akcam berbagi pengalaman Turki yang ikut membantu dalam mengatasi pengungsi Timur Tengah dan mengajak seluruh anggota Uni Eropa untuk membantu menampung para pengungsi. Dubes Turki juga menyampaikan apresiasinya kepada negara-negara ASEAN yang berkenan menampung pengungsi Rohingya.

Selain kehadiran para Duta Besar, seminar juga diramaikan dengan tanggapan-tanggapan dari A. Agus Sriyono Deputi Luar Negeri Kemenko Polhukam, Prof. Dr. Makarim Wibisono, M.A. Mantan Direktur Eksekutif ASEAN Foundation, Kol. Beni Wahyuni Kementerian Pertahanan, dan Laksamana Muda TNI (Purn) Robert Mangindaan Tenaga Profesional Bidang Diplomasi/Hi Lemhannas RI.

Lemhannas RI Tanda Tangan Tiga Nota Kesepahaman



Lemhannas RI menjalin kerja sama dengan Universitas Negeri Jakarta, Universitas Sahid Jakarta, dan Komite Nasional Pemuda Indonesia melalui penandatanganan nota kesepahaman, yang berlangsung di Lobi Nusantara, Lt. 1 Gd. Tri Gatra, Jumat (11/9).

Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA, Rektor Universitas Negeri Jakarta Prof. Dr. Djaali, Rektor Universitas Sahid Jakarta Prof. Dr. Ir. Budiarto Subroto, DEA, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia Muhammad Rifai Darus, S.H., M.H..

Dalam kesempatan tersebut Budi Susilo Soepandji mengatakan bahwa Perguruan tinggi dan KNPI merupakan perpanjangan tangan dari Lemhannas RI dalam mensosialisasikan Wawasan Kebangsaan kepada generasi muda. "kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat wawasan kebangsaan para mahasiswa dan para pemuda Indonesia serta dapat meningkatkan peran perguruan tinggi dan peran KNPI dalam pencapaian tujuan nasional." Ujar Budi Susilo Soepandji.

Penandatanganan nota kesepahaman dilaksanakan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antar para pihak. Kerjasama antara Lemhannas RI dengan Universitas Negeri Jakarta, Universitas Sahid Jakarta dan Komite Nasional Pemuda Indonesia mencakup peningkatan Kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, pertukaran tenaga ahli, pemantapan nilai-nilai kebangsaan, dan tukar menukar informasi dalam rangka pengukuran ketahanan nasional, serta pelaksanaan pengkajian strategik.

Pada kesempatan ini, hadir Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksamana Madya Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A., Sekretaris Dewan Pengarah Lemhannas RI Dr. Ardi Pratadinata, M.H., M.Si., Sekretaris Utama Lemhannas RI Drs. Suhardi Alius, M.H., Inspektur Lemhannas RI Brigadir Jenderal Drs. Didid Widjanardi, S.H., para Deputi, dan para Kepala Biro Lemhannas RI.

Buka *Workshop* Labkurtannas, Gubernur Lemhannas RI Tekankan Pembahasan Isu-isu Strategis

Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E..A. secara resmi membuka *Workshop* dan Pembahasan Isu Strategis Ketahanan Nasional Wilayah Provinsi di Indonesia bagi kepala Bappeda 34 Provinsi, Kepala BPS 33 Provinsi serta perwakilan dari beberapa Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia di Ruang Auditorium Gajah Mada Lt. 3 Gd. Pancagatra Lemhannas RI pada Kamis (10/9).

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa walaupun Ketahanan Nasional semakin membaik, masih terdapat masalah-masalah yang hingga saat ini belum dapat diselesaikan. "Masih terdapat beberapa masalah kronis yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan dan ternyata sebagian dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah permasalahan-permasalahan lama." ujar Budi Susilo Soepandji.

Masalah-masalah tersebut adalah jumlah penduduk miskin yang masih tinggi, masih belum selesainya konflik horizontal dan vertikal serta belum terselesaikannya isu-isu strategis nasional. Permasalahan tersebut akan mempengaruhi Ketahanan Nasional jika tidak segera diselesaikan. Oleh karena itu, Budi Susilo Soepandji berharap isu-isu strategis tersebut dapat didiskusikan. "Saya berharap dalam *workshop* ini, isu-isu strategis tersebut serta akar permasalahannya dapat didiskusikan secara maksimal." kata Budi Susilo Soepandji.

Menurut laporan ketua Labkurtannas, Prof. Dr. Miyasto, S.U., Selain untuk membahas isu-isu strategis, *workshop* yang diselenggarakan selama dua hari, dari tanggal 10 hingga 11 September 2015 juga bertujuan untuk melakukan tinjauan

kembali indikator, parameter, dan variabel yang telah dibangun oleh Lemhannas RI melalui Labkurtannas, mempertajam kembali melalui isu-isu strategis yang berasal dari studi Labkurtannas pada tahun 2014 serta mengkaji beberapa hambatan dalam pencapaian tujuan nasional.

Adapun materi yang disampaikan di sesi pertama oleh Dr. Kecuk Suharyanto, Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik, BPS Pusat yaitu mengenai Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi. Dalam paparannya, Kecuk Suharyanto mengemukakan bahwa terdapat tiga pendapat mengenai keterkaitan demokrasi dengan pertumbuhan ekonomi. Pendapat pertama mengatakan bahwa demokrasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan yang erat. Namun, di satu sisi, terdapat pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada keterkaitan antara demokrasi dengan pertumbuhan ekonomi. Pendapat terakhir mengatakan terdapat korelasi antara demokrasi dengan pertumbuhan ekonomi namun tidak secara langsung.

Kemudian, *workshop* dilanjutkan dengan materi sesi kedua disampaikan oleh Andri Syahriza, S.Kom., M.Si., Asisten Deputy Bidang Dukungan data Kebijakan dan Informatika dari Sekretariat Negara yang membahas mengenai *single database* nasional.

Turut hadir dalam acara pembukaan tersebut adalah Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H, para Deputy, Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji, Tenaga Profesional, dan para Pejabat Struktural Lemhannas RI.



Foto: Humas Lemhannas RI

Pelepasan Lulusan Program Studi Kajian Ketahanan Nasional L-IUN



Foto: Humas Lemhannas RI

“**K**ehadiran para intelektual muda bidang ketahanan nasional, merupakan angin segar yang diharapkan akan memperkuat daya dorong lahirnya kajian – kajian ketahanan nasional yang berkualitas sehingga mampu mewujudkan ketahanan bangsa yang tangguh”, ujar Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. saat mengawali Pelepasan Lulusan Program Studi Kajian Ketahanan Nasional L-IUN Kerja Sama Lemhannas RI – Universitas Indonesia di Ruang Nusantara Gd. Trigatra Lemhannas RI, Jakarta pada Jumat (11/9).

Lemhannas *Inter Universities Network* (L-IUN) merupakan kerja sama Lemhannas RI dengan UGM, UI, dan UNHAN dalam penyelenggaraan program beasiswa Pascasarjana Ketahanan Nasional dengan sumber dana dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkeu RI. Program kerja sama ini dibentuk berdasarkan cepatnya perubahan yang terjadi di masyarakat yang membutuhkan respon cepat dan tepat dari para pimpinan dan tokoh masyarakat.

Gubernur Lemhannas RI menyampaikan harapannya kepada para alumnus untuk dapat berkontribusi baik secara

langsung maupun tidak langsung dalam lingkungan kerja masing-masing. “Gelar yang nantinya Anda sandang harus mampu menjadi motivasi bagi Saudara untuk mendorong terciptanya kehidupan nasional yang sehat, beretika, bermoral dan beradab sesuai cita-cita luhur pancasila yang telah kita sepakati bersama”, ujar Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. dihadapan 18 lulusan Program Pascasarjana Ketahanan Nasional L-IUN Lemhannas RI - UI.

Pada tahun 2015, peserta program kerja sama Program Studi Kajian Ketahanan Nasional L-IUN Lemhannas RI - UI telah menyelesaikan studi pada Pascasarjana Ketahanan Nasional dengan baik dan tepat waktu, bahkan 11 diantaranya mendapat predikat *Cum Laude*.

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A., Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Mayjen TNI Nasir Madjid, Prof. Dadan Umar Daihani, D.E.A., Ketua Prodi Pascasarjana UI Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, Ketua Prodi Kajian Ketahanan Nasional UI Prof. Dr. Ronny R. Nitibaskara, serta para pejabat di lingkungan Sekretariat Utama Lemhannas RI.